

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kompas | Sindo | Tempo |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Indopos | Pos Kota | Warta Kota |

Meski Telat, APBD 2020 Tetap Diketok

Total Anggaran Rp87,95 Triliun

JAKARTA - DPRD DKI Jakarta akhirnya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Berdasarkan ketentuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) seharusnya sudah diketok paling lambat 30 November lalu.

Total anggaran yang disahkan adalah Rp87,95 triliun. Kendati demikian, ada beberapa catatan yang turut dilampirkan oleh legislatif untuk menjadi bahan evaluasi. "Saya bacakan beberapa catatan, saran, dan masukan bidang pemerintahan, bidang perekonomian, bidang keuangan, bidang pembangunan dan lingkungan hidup dan bidang kesejahteraan rakyat," ucap Achmad Yani, anggota Badan Anggaran (Banggar) saat membacakan dokumen Raperda APBD 2020 di DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

Pada bidang pemerintahan, sambung Yani, DPRD DKI menyepakati bahwa ada pengurangan anggota TGUPP dari 67 menjadi 50 orang. Tim ini pun akan dievaluasi dalam melaksanakan tugas agar kasus rangkap jabatan tidak terulang.

"Untuk perekonomian, DPRD berharap revitalisasi TIM (Taman Ismail Marzuki, Red) dilaksanakan setelah moratorium dan perlu dilakukan koordinasi yang intensif antara DPRD, eksekutif dan seniman," kata dia.

Lalu, lanjut dia, pada bidang keuangan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor menjadi sorotan karena pendapatannya hanya Rp1,3 triliun padahal seharusnya bisa lebih besar. Kemudian pada bidang pembangunan dan lingkungan hidup, sama seperti sebelum-sebelumnya masih disoroti masalah banjir dan kemacetan.

"Pada bidang kesejahteraan rakyat, DPRD DKI Jakarta sebenarnya sangat mendukung rencana pembangunan boarding school untuk membantu rakyat kurang mampu agar dapat bersekolah, tetapi rencana ini harus ada kajian komprehensif," tutur dia.

Selesai pembacaan laporan, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi langsung meminta persetujuan kepada anggota dewan yang hadir. "Apakah DPRD DKI dapat menyetujui Raperda APBD 2020 ini," tanya Prasetyo di lokasi yang sama. Seluruh anggota pun menjawab setuju dengan serentak dan dilanjutkan ketokan palu oleh ketua rapat. (aen)

